

**PELATIHAN PENGELOLAAN USAHA SESUAI POTENSI DESA DAN
PELAPORAN KEUANGAN BUMDESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Intan Rakhmawati*, Iman Waskito, Wirawan Suhaedi,
Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya, Heni Yulianingsih**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: intanrakhmawati@unram.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha ekonomi yang umumnya memperoleh penyertaan modal dari pemerintah desa. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pengelolaan usaha, dan pelatihan dalam hal pelaporan keuangan. Beragamnya jenis usaha pada BUM Desa di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Labuapi, antara lain simpan pinjam, usaha dagang, hingga pertanian hingga usaha wisata petik buah, melatarbelakangi diperlukannya pengabdian ini. Pelatihan juga diberikan dengan tema inovasi produk BUM Desa, sesuai dengan potensi desa. Metode pelatihan dilaksanakan melalui pelatihan pengelolaan usaha dan pelatihan pembukuan sederhana beserta aspek keuangan terkait modal. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pendampingan BUM Desa. Luaran dari pengabdian ini adalah peningkatan kemampuan BUM Desa untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dicapai jika BUM Desa dapat mengelola modal dan membuat laporan keuangan dengan efisien. Kata Kunci: Pengelolaan Usaha; Potensi; Pelaporan Keuangan.

Kata kunci: Pengelolaan Usaha, Pelaporan Keuangan, Potensi

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUM Desa) merupakan badan usaha ekonomi yang umumnya memperoleh penyertaan modal dari pemerintah desa. Pemerintah desa memberikan penyertaan modal dari APBDes karena diharapkan badan usaha ekonomi masyarakat ini dapat mengelola dana dari APBDes guna mengembangkan potensi desa menjadi usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. BUM Desa juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik dalam pembelian barang, perolehan jasa, maupun simpan pinjam.

Kegiatan serupa terkait pengelolaan usaha, sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan untuk akuntabilitas BUM Desa telah dilakukan antara lain oleh Iqbal et al., (2021), Astuti et al., (2022), Rakhmawati et al., (2022) Susanti (2022), Rakhmawati et al., (2023), Ningsih et al., (2023), Wuryandini (2024), dan Eferyn et al., (2025). Pengabdian umumnya dilakukan terlebih dahulu melalui *Focus Group Discussion* (FGD), untuk menggali masalah dan potensi pengelolaan BUM Desa. Senada dengan itu, pengabdian ini dirancang oleh Tim Pengabdian agar pengelola usaha BUM Desa memahami cara mengelola usaha dengan efektif, sesuai dengan potensi desa dan kendala tiap wilayah yang berbeda. Sebagai contoh, BUM Desa yang bergerak di bidang simpan pinjam seringkali menghadapi kendala penagihan piutangnya. Demikian pula BUM Desa yang bergerak di usaha dagang, seringkali menghadapi kendala memelihara kas untuk operasional dan pengembangan usaha.

Kendala serupa umumnya dihadapi pengelola BUM Desa, dengan penyebab yang umumnya serupa. Seperti dikemukakan oleh Iqbal et al., (2021) yang menemukan bahwa permasalahan mitra BUM Desa umumnya disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan terutama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku ditambah adanya peraturan pemerintah, belum lagi terbatasnya sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

Lokasi pengabdian adalah Kecamatan Kediri dan Kecamatan Labuapi di Kabupaten Lombok Barat masing-masing memiliki 10 dan 12 BUM Desa. Namun peneliti mengambil masing-masing 3 BUM Desa dari masing-masing kecamatan. BUM Desa yang diambil sebagai subjek pengabdian

adalah BUM Desa yang bergerak di bidang usaha dagang, dan simpan pinjam. Sebagai tambahannya, ada pula di antara BUM Desa tersebut yang memiliki usaha pertanian, dan usaha agrowisata petik buah, untuk menjadi objek BUM Desa. Rata-rata BUM Desa ini mengalami kendala pada pengelolaan usaha dan permodalan, serta belum memiliki laporan keuangan, ataupun sudah memiliki laporan keuangan, namun cukup kebingungan dengan sistem penjurnalan.

Atas dasar kesemua kendala tersebut, Tim Pengabdian tidak hanya memberikan pelatihan pengelolaan usaha, namun juga pelatihan dalam hal pelaporan keuangan. Terlebih sejak tahun ini, BUM Desa diarahkan untuk menggunakan aplikasi FORSA yang dirancang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Republik Indonesia, 2024), sebagai aplikasi yang digunakan sebagai sistem informasi akuntansi BUM Desa, sesuai Keputusan Menteri Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (2022) p. 202).

METODE KEGIATAN

Metode pelatihan dilaksanakan melalui pelatihan pengelolaan usaha dan pelatihan pembukuan sederhana beserta aspek keuangan usaha, termasuk yang terkait dengan pengelolaan modal. Tujuannya, agar BUM Desa yang telah berjalan, namun belum dapat memupuk modalnya dengan baik, dapat lebih baik dalam melakukan penyisihan modal, terutama untuk pengembangan usaha. Komunikasi dan kolaborasi pelatihan dan pemantauan juga dilakukan bekerja sama dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Lombok Barat, sebagai verifikator kinerja BUM Desa. Berikut tahap pelaksanaan pengabdian:

- a. Pelatihan pengelolaan usaha BUM Desa. Di dalam proses ini tidak hanya terkait persoalan dalam pengelolaan modal usaha dan bagi hasil, melainkan juga usulan perbaikan atau inovasi produk BUM Desa.
- b. Pelatihan penggunaan aplikasi pembuatan laporan keuangan BUM Desa, sesuai tipe usaha BUM Desa. Jika BUM Desa sama sekali belum memiliki pencatatan, diharapkan mulai menggunakan buku kas, ataupun nota untuk bukti transaksi.

Mitra BUM Desa di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Labuapi diharapkan dapat berperan aktif, baik dalam pelatihan, ataupun melalui wa grup yang dibuat Tim Pengabdian untuk monitoring kinerja BUM Desa. Ketua dan anggota Tim Pengabdian berperan dalam setiap proses ini, termasuk dalam pemantauan pelaporan keuangan BUM Desa.

Terkait dengan mahasiswa yang terlibat, kegiatan ini terkait dengan mata kuliah Kewirausahaan, Studi Kelayakan Bisnis, Akuntansi Keuangan 1, dan Akuntansi Koperasi dan UMKM. Untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa semester sebelumnya (seperti mata kuliah Kewirausahaan), kegiatan pengabdian ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa saat lulus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana yang diterima BUM Desa dari pemerintah desa sering kali mengalami kendala, terutama dalam mengenali potensi usaha yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya desa. Selain itu, kendala lain yang juga sering menjadi penghambat perkembangan BUM Desa antara lain manajemen usaha, perencanaan, operasional, hingga penyusunan Laporan Keuangan.

Menurut Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) per November 2024 di Kabupaten Lombok Barat diketahui kondisi saat ini yang ada pada Kecamatan Kediri setidaknya memiliki 10 BUM Desa, bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha dagang. Sedangkan Kecamatan Labuapi memiliki 12 BUM Desa, bergerak di bidang simpan pinjam, usaha dagang, dan agrowisata petik buah. Namun tidak semua BUM Desa masih aktif, hanya sebagian diantaranya daerah Kediri memiliki 7 BUM Desa aktif dan Labuapi memiliki 8 BUM Desa aktif.

Selain itu, pengelolaan usaha dan pelaporan keuangan BUM Desa bukan hanya menjadi tanggung jawab internal desa. Tetapi juga secara langsung terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten. Seperti dalam presentasi BPKP (2024) dengan tema “Strategi Penguatan BUM Desa: Sinergi Optimalisasi Potensi Lokal Desa” yang menegaskan serta penyertaan modal BUM Desa hanya diberikan kepada BUM Desa yang mampu dan paham dalam

mengelola modal sekaligus akuntabel, sehingga dapat memanfaatkan dana desa secara optimal bagi perekonomian desa. Dengan demikian, kemampuan dan keberhasilan pelaporan keuangan BUM Desa menjadi sangat penting bagi keberlanjutan modal dari desa.

Kegiatan ini juga memiliki keterkaitan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Lombok Barat, dan Kasubid Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai verifikator kinerja BUM Desa. Pengelolaan BUM Desa yang baik akan berdampak langsung pada nama baik daerah, sehingga pelatihan pengelolaan usaha dan penyusunan Laporan Keuangan yang benar menjadi sangat penting di Kabupaten Lombok Barat. Pelatihan dan pendampingan telah diberikan kepada empat BUM Desa dari dua kecamatan. Pelatihan dilaksanakan di Desa Dasan Baru. Peserta pengabdian sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Nama BUM Desa Peserta Pengabdian

No	Kecamatan	BUM Desa Sasaran	Waktu Pelaksanaan
1	Kediri	BUM Desa Ombe Baru BUM Desa Gelogor	September 2025
2	Labuapi	BUM Desa Labuapi BUM Desa Kuranji	September 2025

Adapun beberapa tahapan yang telah dilakukan dalam pengabdian ini adalah:

- Pada Bulan Februari, tim pengabdian telah melakukan konsultasi dengan tenaga ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mengetahui perkembangan dan kebutuhan BUM Desa sebagai data pendukung dalam pembuatan proposal pengabdian.
- Kemudian pada awal Agustus, Tim Pengabdian bertemu kembali dengan tenaga ahli DPMD Kabupaten Lombok Barat untuk membuat izin pengabdian dan melakukan diskusi mengenai kondisi terkini BUM Desa, sekaligus menentukan BUM Desa yang dijadikan subyek pengabdian dari kecamatan Kediri dan kecamatan Labuapi dan didapatkan beberapa diantaranya pada Kecamatan Labuapi ada BUM Desa Bajur, BUM Desa Labuapi dan BUM Desa Kuranji. Pada Kecamatan Kediri ada BUM Desa Dasan Baru, BUM Desa Ombe Baru dan BUM Desa Gelogor.
- Kemudian bertemu kembali dengan tenaga ahli DPMD di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, untuk membahas aplikasi pembuatan laporan keuangan BUM Desa. Aplikasi tersebut dibuat oleh tenaga ahli DPMD yakni Bu Evi serta membahas kesesuaian standar akuntansi yang digunakan pada aplikasi tersebut.
- Pada tahap ini aplikasi telah selesai dibuat dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan daerah yang sudah ditentukan yakni Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri.
- Tahap terakhir yakni Pendampingan yang dilakukan dengan cara melakukan konsultasi pengelolaan usaha sesuai potensi BUM DESA serta cara penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa yang benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Terkait pengelolaan usaha, Tim Pengabdian telah memberikan pelatihan terkait pengelolaan usaha agar dapat mempertahankan modal, dengan adanya Dana Cadangan. Selain itu, pelatihan melalui ide inovasi produk ataupun jasa juga diberikan Tim Pengabdian, dengan memperhitungkan ketersediaan modal. Rata-rata BUM Desa juga membutuhkan metode untuk pengelolaan modal usaha yang lebih baik, dengan menyeimbangkan bagi hasil dengan desa sebagai pemberi modal, anggota BUM Desa, maupun pengelola BUM Desa. Kekurangan modal akan menjadi efek dari kurangnya kemampuan pengelolaan modal usaha (Ariyanto, 2024).

Senada dengan hal tersebut, menurut BPKP (2024), dalam pengelolaan usaha, sebagian besar 88% dari 61.069 BUM Desa yang diuji petik oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada 2024, belum menyusun rencana bisnis yang memadai. Format dan pelatihan, utamanya yang disesuaikan dengan bidang usaha BUM Desa, menjadi penyebab permasalahan ini.


Terkait pembukuan juga, pembukuan sangat dibutuhkan. Menurut Mariyadi (2025), pembukuan juga dibutuhkan untuk menganalisa perkembangan usaha BUM Desa antar waktu. Perkembangan ini mulai dari keuntungan atau kerugian yang diperoleh, bahkan untuk mendeteksi kemungkinan potensi

kerugian. Masih menurut Mariyadi (2025), pada BUM Desa usaha dagang, pembukuan juga dibutuhkan untuk mengetahui kekurangan barang dagangan tertentu.

Selain itu, rata-rata BUM Desa membutuhkan format pencatatan dan pelaporan keuangan yang sederhana, terlebih dikarenakan latar belakang pendidikan pengelola BUM Desa yang rata-rata non akuntansi. Tim Pengabdian mengarahkan penggunaan buku kas dan jurnal penyesuaian untuk akun tertentu yang membutuhkan penyesuaian pada akhir periode (seperti kas, piutang, persediaan, dan aktiva tetap), agar dapat membuat laporan keuangan dengan input lebih sederhana.

Berikut tampilan dasar aplikasi pelaporan keuangan yang diberikan Tim Pengabdian, dengan beberapa contoh transaksi. Gambar berikut menunjukkan format buku kas.

BUMDES
 BUKU KAS

Kembali ke


Tanggal	No. Bukti	Keterangan	Kode BP	Kode Rek	Masuk	Keluar	Saldo	Kontrol Nama Rekening
1/Jan/22		Saldo awal kas		110				Kas
4/Jan/22		Sewa lahan pusat informasi		130				Sewa dibayar dimuka
4/Jan/22		Pembelian alat tulis kantor		140				Atk/Perlengkapan
5/Jan/22		Biaya Listrik		540				Biaya Listrik
14/Jan/22		Pembelian alat tulis kantor		140				Atk/Perlengkapan

Gambar 1. Contoh Format Buku Kas BUM Desa

Sumber: Suhaedi et al., (2022)

Jurnal berfungsi untuk merekam tanggal, akun yang terlibat, jumlah, serta penjelasan transaksi sebelum data tersebut dipindahkan (*posting*) ke buku besar (*ledger*). Jurnal umum digantikan dengan buku kas yang lebih sederhana bagi BUM Desa, yang kemudian dilengkapi dengan jurnal penyesuaian pada akhir periode, untuk beberapa akun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Rekap jurnal kemudian disajikan dalam buku besar. Buku Besar berfungsi untuk memudahkan merekap semua transaksi berdasarkan pos masing-masing akun.

Berdasarkan buku besar, BUM Desa dapat membuat laporan keuangan, baik Laporan Laba Rugi maupun Neraca/Laporan Posisi Keuangan. Melalui Laporan Laba Rugi, pihak yang memiliki kepentingan seperti pengawas dan pengelola BUM Desa dapat melihat terkait dengan kondisi keuangan BUM Desa untuk periode bersangkutan. Berikut format laporan laba rugi (contoh usaha dagang) BUM Desa:

LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025

PENDAPATAN

Unit Pembiayaan	Rp 2,331,600
Unit Kontruksi	Rp 6,686,000
Bagi Hasil	Rp -
Rekening Bank	Rp -
Jasa Internet	Rp -
Agro Bisnis	Rp -

JUMLAH PENDAPATAN

Rp 9,017,600

HARGA POKOK PENJUALAN

Persediaan Awal	Rp -
Pembelian	
(Persediaan Akhir)	
By. Kerugian	Rp -

JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN

Rp -

LABA KOTOR USAHA

Rp 9,017,600

BIAYA-BIAYA

Biaya Operasional
Beban Langsung

Gaji Karyawan	
Biaya Angkut	
Pembayaran hasil pihak III	Rp -
Pengembalian dana angsuran	
Bonus Pemasaran / Asuransi	Rp -
Beban Tak Langsung	
Beban RUPS	
Beban Adminstrasi & Umum	Rp -
Bansos / hibah	Rp -
Beban Penyusutan	
Beban Perizinan Usaha	Rp -
Biaya Non Operasi	
Beban adminstrasi rekening bank	Rp -
JUMLAH BIAYA	Rp -
LABA BERSIH USAHA	Rp 9,017,600

Gambar 2. Contoh Format Laporan Laba Rugi BUM Desa

Berdasarkan Laporan Laba Rugi, dengan adanya kontribusi laba bersih pada ekuitas, dibuat Neraca/Laporan Posisi Keuangan. Berikut contoh formatnya:

PERKIRAAN	MEI 2025 (Rp)	JUNI 2025 (Rp)
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas Besar	34,809,800	17,403,192
Bank		
Kas Unit Pembiayaan	8,385,592	12,625,400
Piutang Unit Pembiayaan		
Pembiayaan	79,232,400	66,979,000
Tanah	23,239,000	22,867,000
Persediaan Barang	233,162,000	233,162,000
Piutang Unit Kontruksi		
Jumlah Aktiva Lancar	378,828,792	353,036,592
Aktiva Tetap		
Tanah		-
Bangunan		-
Perlengkapan Kantor	-	-
Akumulasi Penyusutan	-	-
Jumlah Aktiva Tetap	-	-
JUMLAH AKTIVA	378,828,792	353,036,592
PASIVA		
Kewajiban		
Hutang Jangka Pendek	14,464,727	14,464,727
Hutang Jangka Panjang		
Hutang Jasa Pengurus Thn 2021	11,838,000	-
Jumlah Kewajiban	26,302,727	14,464,727
Modal		
Modal - Hibah Pemprov	91,000,000	91,000,000
Modal Hibah Desa	171,970,765	171,970,765
Modal Pihak ke III		
Dana Penyaluran PADes 2016	22,971,800	-
Dana Cadangan	46,395,900	46,395,900
Laba Usaha Tahun Berjalan	20,187,600	29,205,200
Jumlah Modal	352,526,065	338,571,865
JUMLAH PASIVA	378,828,792	353,036,592

Gambar 3. Contoh Format Neraca/Laporan Posisi Keuangan BUM Desa

Gambar 3 merupakan format Neraca/Laporan Posisi Keuangan BUM Desa yang digunakan untuk merekap semua aktifitas dana masuk dan keluar. Neraca/Laporan Posisi Keuangan BUM Desa merupakan laporan akhir, dimana nantinya dari laporan tersebut dapat memudahkan pengawas atau pengelola BUM Desa dapat menentukan kebijakan dan rencana kedepannya. Melalui laporan ini, dapat terlihat apakah BUM Desa terkait secara keuangan sedang dalam kondisi baik atau bahkan perlu perbaikan. Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian:



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Setelah aplikasi penyusunan Laporan Keuangan dapat diimplementasikan dan dijalankan orang pengelola BUM Desa, Tim Pengabdian melakukan pendampingan, melalui wa grup dan pendampingan langsung, dengan kurun waktu yang ditetapkan.

Pengabdian ini sangat diperlukan, terutama sejak 2025, terdapat kewajiban BUM Desa untuk akuntabel, dengan melaporkan keuangannya melalui aplikasi FORSA (Republik Indonesia, 2024). Melalui aplikasi ini diharapkan BUM Desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, sesuai dengan perundangan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal senada diungkapkan oleh Khaerunnisa (2024), yang menyatakan pernyataan dari Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, bahwa dari 65.941 BUMDes, baru 18.850 di antaranya yang telah berbadan hukum dan dimungkinkan dalam menggunakan FORSA. Padahal kinerja BUM Desa saat dipantau oleh BPKP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan, ternyata rata-rata BUM Desa membutuhkan format pelaporan keuangan yang sederhana, sehingga pengelolaan usaha dan pengelolaan modal, termasuk modal dari desa dapat dimanfaatkan lebih baik. Berdasarkan hambatan tersebut maka kami telah melaksanakan pengabdian kepada empat BUM Desa di dua kecamatan yakni Kediri dan Labuapi dengan fokus pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan jenis usaha dari masing-masing BUM Desa. Pada periode berikutnya, jika laporan keuangan sudah dapat dibuat dengan baik, Tim Pengabdian dapat melanjutkan dengan kegiatan pengabdian input pencatatan dan pelaporan keuangan melalui aplikasi FORSA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Lombok Barat, pendamping BUM Desa wilayah Kediri, pendamping BUM Desa wilayah Labuapi, yang telah memberikan waktu dan kesempatan Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram untuk melakukan kolaborasi dalam tema pengabdian. Ucapan terima kasih kami ucapkan pula kepada para pengelola BUM Desa yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk menghadiri kegiatan pelatihan, serta berkontribusi dalam kegiatan pendampingan. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa Dasan Baru, Kabupaten Lombok Barat, yang telah menyediakan ruangan untuk kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, R. (2024, January 19). Permasalahan Bumdes dan Solusinya. *sedesa.id*. <https://sedesa.id/permasalahan-bumdes-dan-solusinya/>
- Astuti, B. R. D., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 2(2), 263–267.
- BPKP, D. P. P. K. D. (PPKD). (2024, November 15). *Transformasi Ekonomi Desa: Penguatan BUMDes sebagai Penggerak Ekonomi Desa*. Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2024, Berita Badan Pengawas

- Keuangan dan Pembangunan (BPKP). <https://www.bpkp.go.id/id/berita/mDmV/transformati-ekonomi-desa-penguatan-bumdes-sebagai-penggerak-ekonomi-desa>
- Eferyn, K., Riningsih, D., Puspita, N. V., Agustina, E., & Fatkul K, B. (2025). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Desa Karangsoko Kec. Trenggalek. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://journal.almatani.com/index.php/arsy/article/view/1242>
- Iqbal, M., Wellawati, W., & Cahya, N. (2021). *Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Sosialisasi dan Pendampingan) Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan BUMDesa*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/8904/Laporan%20PKM%20BUMDesa%20Karya%20Mandiri%20-%20Muhammad%20Iqbal.pdf?sequence=1#:~:text=Kegiatan%20ini%20merupakan%20pengabdian%20kepada%20masyarakat%20%28PKM%29%20yang,pengukuran%2C%20pengungkapan%20dan%20pelaporan%20keuangan%20unit%20usaha%20BUMDesa>.
- Keputusan Menteri Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (2022). <https://jdih.kemendes.go.id/web/regulations/read/panduan-penyusunan-laporan-keuangan-badan-usaha-milik-desa-menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-republik-indonesia-136-2022>
- Khaerunnisa, R. (2024, Oktober). BPKP Ingatkan Agar BUMDes Betul-Betul Akuntabel Dalam Kelola Dana. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4392226/bpkp-ingatkan-agar-bumdes-betul-betul-akuntabel-dalam-kelola-dana>
- Mariyadi, M. (2025, March 24). *Anda Belum Paham Pembukuan Bumdes? Ini Contoh Formatnya*. <https://updesa.com/pembukuan-bumdes/>
- Ningsih, N. H. I., Tri Y, B. R., Indrawati, M., Sandikawati, R. O., Wahyuliati, E., & Nurlia, N. (2023). Penyuluhan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes sesuai Petunjuk BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) di Desa Midang Kab. Lombok Barat. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 3(2). https://www.academia.edu/106012440/Penyuluhan_dan_Pelatihan_Penyusunan_Laporan_Keuangan_Bumdes_sesuai_Petunjuk_BPKP_Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan_di_Desa_Midang_Kab_Lombok_Barat?nav_from=93e6cf2d-6080-4d6c-91d7-e8563d98bc97
- Rakhmawati, I., Hendri, R. S., & Astuti, B. R. D. (2022). Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v2i2.74>
- Rakhmawati, I., Hendri, R. S., Husnaini, W., Prasidya, T. C. I. T., & Mariadi, Y. (2023). Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi BUMDes di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Warta Desa*, 5(3). <https://jwd.unram.ac.id/index.php/jwd/article/view/273>
- Republik Indonesia, B. P. K. dan P. (2024). *Forsa (Keuangan) BUM Desa*. <https://forsabumdes.org/>
- Suhaedi, W., Astuti, B. R. D., & Rakhmawati, I. (2022). Peningkatan Akuntabilitas Keuangan BUMDes Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 3(1). <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/abdimas/article/view/305>
- Susanti, A. D. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Sari Amanah. *Abdimas Galuh*, 4(2). https://www.academia.edu/110250857/Pelatihan_Dan_Pendampingan_Penyusunan_Laporan_Keuangan_Bumdes_Sari_Amanah
- Wuryandini, A. R. (2024). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 232–239.